



**RISALAH RAPAT
KOMISI II DPR RI**

-
- Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : II
Rapat Ke : -
Jenis Rapat : Rapat Kerja (RAKER)
Dengan : Sekretaris Kabinet RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 4 Februari 2015
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara :
1. Perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan jajaran Sekretaris Kabinet;
2. Rencana Strategis Sekretatis Kabinet dalam susunan "Kabinet Kerja"2014-2019;
3. Pembicaraan awal pembahasan APBN-P 2015;
4. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014;
5. Dan lain-lain.
- Ketua Rapat : **Dr. Wahidin Halim, M.Si./Wakil Ketua Komisi II DPR RI**
Sekretaris Rapat : Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI.
- Hadir : **A. Anggota Komisi II DPR RI**
41 dari 50 Anggota dengan rincian:

PIMPINAN

1. Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA
2. Drs. H. WAHIDIN HALIM, M.Si
3. Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.
4. H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

F-PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)

5. KOMARUDIN WATUBUN, SH, MH
6. ARIF WIBOWO
7. BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil
8. DIAH PITALOKA, S.sos
9. Ir. TAGORE ABUBAKAR
10. ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU
11. Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM
12. H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH
13. Drs. SIRMADJI, M.Pd

F-PARTAI GOLONGAN KARYA (F-GOLKAR)

14. Drs. H. DADANG S MUCHTAR
15. Drs. A. H. MUJIB ROHMAT
16. TABRANI MAAMUN
17. AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si

F-PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)

19. AZIKIN SOLTHAN, M.Si
20. AMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si

20. H. SUBARNA, SE.,M.Si
21. SUASANA DACHI, SH
22. Ir. ENDRO HERMONO, MBA

F-PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

23. SAAN MUSTOFA, M.Si.
24. H. ZULKIFLI ANWAR
25. Ir. FANDI UTOMO
26. LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., SH., MH
27. EVERT ERENST MANGINDAAN, S.Ip.

F-PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

28. YANDRI SUSANTO
29. H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.
30. AMRAN, S.E.

F-PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

31. H. YANUAR PRIHATIN, M.Si

F-PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

32. H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.
33. Dr. H SA'DUDDIN, MM
34. MUHAMMAD YUDI KOTOUKY

F-PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

35. H. MOH. ARWANI THOMAFI
36. Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

F-PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

37. H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE., SH., MH
38. Drs. TAMANURI, MM
39. H. M. LUTHFI A. MUTTY

F-PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

40. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH
41. Dr. FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, MH

B. Pemerintah

- Sekretaris Kabinet (Andi Widjajanto)

M, M.Si):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat sore.

**Yang saya hormati Menteri Sekretaris Kabinet dan jajarannya.
Rekan-rekan dan Pimpinan Komisi II yang saya hormati.**

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan nikmatnya alhamdulillah pada hari ini kita hadir dalam rangka dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretariat Kabinet dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidang pengawasan dan anggaran dan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, Rapat Kerja pada hari ini dianggap telah memenuhi kourum, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 251 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka perkenanlah kami menyatakan rapat ini dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.30 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Sekretaris Kabinet atas kesediaannya memenuhi undangan dalam Rapat Kerja hari ini. Demikian juga pada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI kami ucapkan terima kasih.

Kemudian saya tawarkan kepada rekan-rekan Anggota persetujuannya yang pertama agendanya dalam Rapat Kerja ini adalah perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan jajaran Sekretariat Kabinet. Bisa disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Yang kedua rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2019. Sepakat ya?

(RAPAT: SETUJU)

Berikutnya pembicaraan awal pembahasan APBNP 2015. Ketiga poin ini yang menjadi materi dalam rapat pada kali ini. Berarti saya ketok lagi.

(RAPAT: SETUJU)

Bahwa rapat hari ini dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran Komisi II DPR RI dan rapat untuk pertama kalinya dengan Sekretaris Kabinet pasca dilantik pada bulan Oktober 2014 yang lalu melalui kabinet kerja. Adapun beberapa hal yang menjadi pembahasan pada hari ini selain perkenalan antara Sekretariat Kabinet dan Komisi II DPR RI, ingin mengetahui bagaimana rencana strategi dari Sekretariat Kabinet lima tahun ke depan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden Republik Indonesia, selaku kepala pemerintahan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara.

Selain itu Komisi II DPR RI juga ingin mendengarkan penjelasan penyampaian pembicaraan awal dalam rangka pembahasan APBNP 2015 serta terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2014. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan Kepala Sekretariat Kabinet untuk menyampaikan penjelasan, namun sebelum itu kami perkenalkan dan nanti akan masing-masing memperkenalkan diri.

Komisi II, Fraksi Demokrat, dari Dapil III Banten. Sebaliknya

WAKIL KETUA (Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA/F-GERINDRA):

Terima kasih Pimpinan.

Saya A. Riza Patria, dari Fraksi Gerindra, Dapil Jabar III, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur.

Terima kasih.

WAKIL KETUA (H.MUSTAFA KAMAL, S.S./F-PKS):

Terima kasih Pak Wahidin. Nama saya Mustafa Kamal, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I.

WAKIL KETUA (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si./F-PKB):

Assalaamu'laikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Nama saya Lukman Edy, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan Riau II.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Anggota dari sebelah kanan. Dari ujung Pak Mujib Rahmat silakan.

F-PG (Drs. A. H. MUJIB ROHMAT):

Baik, terima kasih. Selamat siang.

Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota. Nama saya Mujib Rohmat, saya dari Fraksi Partai Golongan Karya, daerah pemilihan satu Jawa Tengah, Semarang, Kendal, Ungaran dan Salatiga. Terima kasih.

F-GERINDRA (SUASANA DACHI, SH):

Terima kasih Ketua.

Yang terhormat Pimpinan dan segenap rekan-rekan Komisi II, dan terlebih lagi kepada Menteri Menseskab dan seluruh jajaran yang hadir. Nama saya Suasana Dachi, Partai Gerindra, Dapil Sumut II.

Terima kasih.

F-HANURA (Dr. FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, MH):

Nama saya Frans Agung Mula Putra, Dapil Lampung I, dari Partai Hanura. Terima kasih.

F-GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si):

Bambang Riyanto, A-357, dari Fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Jawa Tengah V, Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali.

wabarakatuh.

Nama saya Muhamad Yudi, dari Fraksi PKS Dapil Papua.

F-PG (TABRANI MAAMUN):

Terima kasih Pimpinan.

Nama saya Tabrani Maamun, dari Fraksi Golongan Karya, daerah pemilihan Riau I. Terima kasih.

F-GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, MBA):

Terima kasih Ketua. Bapak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Saya Endro Hermono, A-369 dari Fraksi Partai Gerindra, Jawa Timur VI yang meliputi Blitar, Kediri, Tulungagung. Terima kasih.

F-PAN (AMRAN, S.E.):

Terima kasih.

Pimpinan, Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Nama saya Amran, Nomor Anggota 503, Fraksi Partai Amanat Nasional, dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan III.

Terima kasih.

F-PAN (H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Nama saya H. Sukiman, dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Nomor Anggota A-498, kebetulan Kalimantan Barat ini ada 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, berbatasan darat. Dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

F-PG (Drs. H. DADANG S. MUCHTAR):

Terima kasih Pimpinan dan Pak Menteri bersama jajarannya.

Nama saya Dadang S. Muchtar, Nomor Anggota 263 dari Fraksi Golkar, Dapil 7 Jawa Barat, Kerawang, Purwakarta, Bekasi.

Terima kasih.

F-PKS (DR. H SA'DUDDIN, MM):

Baik.

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

wabarakatuh.

eri beserta jajaran yang saya hormati. Nama Sa'aduddin, dari Partai Keadilan Sejahtera, Nomor Anggota 104 Dapil Jawa Barat VII, Kerawang, Purwakarta dan Bekasi sama dengan Pak Dadang. Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Selamat siang. Arif Wibowo, Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Dapil IV, Jember, Lumajang, A-193.

F-PDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH.):

Henry Yosodiningrat, Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Lampung II, 7 kabupaten, 155 kecamatan, 1.200 desa, Nomor Anggota A-140.

Terima kasih.

F-HANURA (RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH):

Baik terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Saya Rufinus Hutaaruk dari Fraksi Hanura, Nomor Anggota A-546.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, SH, MH):

Terima kasih Pimpinan. Saya Komarudin Watubun,

Dapil Papua, Fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih.

F-PDIP (Drs. SIRMADJI, M.Pd):

Terima kasih Pimpinan dan Mensetkab yang beserta seluruh jajaran yang saya hormati, nama Sirmadji A-199, PDI Perjuangan, Jawa Timur VII, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek dan Pacitan. Terima kasih.

F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.sos):

Terima kasih Pimpinan.

Saya Diah Pitaloka, Dapil Jabar III, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, dari Fraksi PDI Perjuangan.

JPULU):

bitupulu, dari Jawa Barat V, Nomor A-156 Kabupaten Bogor,
dari Fraksi PDI Perjuangan.
Terima kasih.

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE., SH., MH):

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Selamat siang. Saya nama Syarif Abdullah. Nomor Anggota 29, dari Fraksi Partai Nasdem, Dapil Kalimantan Barat.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu perkenalan dari Pimpinan maupun Anggota Komisi II, namun yang belum kita sepakati bahwa sekarang jam 15 kurang 40 menit ya, disepakati sampai jam berapa rapat kita jam 17.00 atau 17.30? Sampai jam 16.00? Jam 16.00 nanti kita sepakati berikutnya perpanjang.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan Menseskab untuk menyampaikan penjelasannya.

MENTERI SEKRETARIAT KABINET (ANDI WIJAYANTO):

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI. Pada kesempatan yang baik ini perkenalkan saya Andi Wijayanto, Sekretaris Kabinet pada Kabinet Kerja, mengucapkan terima kasih atas undangan Rapat Kerja yang pertama ini dari Komisi II DPR RI pada masa persidangan tahun 2014-2015, kami juga mengucapkan selamat kepada para Pimpinan Komisi II DPR RI yang telah dipercaya untuk memimpin komisi ini dari Tahun 2014 sampai 2019.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan penjelasan materi Rapat Kerja sebagaimana yang diminta kepada kami melalui surat Sekretaris Jendral DPR RI tanggal 28 Januari 2015.

Ada 4 agenda yang akan kami bahas sesuai dengan yang tadi sudah disepakati.

Yang pertama izinkan kami memperkenalkan jajaran Sekretariat Kabinet.

Yang kedua kami akan memaparkan rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan Kabinet Kerja.

Yang ketiga pembicaraan pembahasan APBNP 2015 dan keempat evaluasi pelaksanaan APBNP Tahun Anggaran 2014.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR yang kami hormati. Susunan organisasi Sekretariat Kabinet sampai saat ini masih mengacu pada Perpres 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet. Berdasarkan Perpres tersebut Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Kabinet berikut personil sekalian saya perkenalkan ke Ibu Bapak sekalian. Saat ini adalah Sekretaris Kabinet saya sendiri Andi Wijayanto. Wakil Sekretaris Kabinet saat ini masih kosong, karena pejabatnya pensiun di akhir tahun lalu. Deputi Bidang Politik Hukum dan Keamanan saat ini dijabat oleh Saudara Bistok Simbolon. Deputi Bidang Perekonomian

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dijabat oleh Saudara Surajudi, Sekretaris Kabinet dijabat oleh Saudara Sifa, Deputi Bidang Administrasi dan Hukum dan Hubungan Internasional dijabat oleh Saudara Fardiansyah Lubis, Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan oleh Saudara Yuli Harsono, Staf Ahli Bidang Riset Teknologi Komunikasi dan Informasi dijabat oleh Saudara Farid Hutomo, Inspektorat dijabat oleh Saudara Wawan Gunawan, Pusat Data dan Informasi dijabat oleh Saudara Alfurqon Setiawan.

Selain struktur jabatan di atas yang pada dasarnya merupakan pejabat-pejabat tetap sejak masa Sekretaris Kabinet yang lalu Pak Dipo Alam belum mengalami perubahan. Sekretariat Kabinet telah mengangkat 3 orang staf khusus yaitu Saudara Teten Masduki, Saudara Alexander Leh, dan Saudara Jaleswari Pramuda Wardani.

Dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang mempersiapkan perubahan organisasi Sekretariat Kabinet karena ada arahan-arahan baru dari Presiden Bapak Jokowi dengan maksud untuk disesuaikan dengan tugas fungsi dari Sekretariat Kabinet dalam rangka mendukung efektivitas kerja kabinet kerja. Dalam waktu dekat Perpres yang mengatur mengenai perubahan struktur organisasi Sekretariat Kabinet tersebut akan segera ditetapkan berdasarkan arahan Presiden struktur organisasi kabinetnya diharapkan sudah diterapkan paling lambat mulai akhir bulan Februari 2015.

Selanjutnya Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR yang kami hormati. Perkenankan kami menyampaikan penjelasan tentang Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015 sampai 2019. Renstra yang telah disusun selain masih merupakan rancangan teknokratik, Renstra ini juga masih menggunakan Perpres Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet sebagai kerangka kelembagaannya. Sedangkan untuk kerangka pendanaannya Sekretariat Kabinet telah menyusun matrik pendanaan RPJM 2015-2019 dan telah disampaikan kepada pihak Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan Perpres 82 Tahun 2010 Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan staf administrasi teknis dan pemikiran kepada Presiden selaku kepala pemerintahan dengan 13 fungsi antara lain:

Satu, menyelenggarakan mengelola dan mengendalikan management kabinet.

Yang kedua, perumusan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Polhukam, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Empat, pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan program pemerintahan di bidang Polhukam, perekonomian dan Kesra. Kami juga bertugas untuk menyiapkan persetujuan prakarsa penyusunan penyampaian rancangan Perpres, Keppres dan Inpres, serta penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Polhukam perekonomian dan Kesra. Selain itu kami juga antara lain bertugas menyelenggarakan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan tugas dan fungsi-fungsi tersebut Setkab telah menetapkan gambaran umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada Tahun 2019 ke dalam visi Sekretariat Kabinet, yaitu menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional, yang handal dalam mendukung Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Sekretariat Kabinet telah menetapkan visi yang akan dilaksanakan yaitu memberikan dukungan management kabinet kepada Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan berbagai potensi permasalahan yang akan dihadapi untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut Sekretariat Kabinet telah menetapkan tujuan untuk merealisasikan misi yaitu memberikan dukungan teknis administrasi pelayanan yang prima dalam rangka mendukung Presiden untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan dalam RPJMN 2015 arah kebijakan untuk 5 tahun ke depan yaitu memberikan dukungan teknis administrasi dan pemikiran kepada Presiden secara optimal.

Dalam mendukung arah kebijakan tersebut Sekretariat Kabinet dalam waktu 5 tahun ke depan memfokuskan kepada 6 strategi.

ara tidak jelas)
agaan dan tata laksana yang efektif.
informasi menuju penyelenggaraan e-government.

Yang keempat peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
Kelima meningkatkan kualitas efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana.
Dan ke enam peningkatan kualitas pengawasan internal.

Untuk melaksanakan ke enam strategi tersebut, Sekretariat Kabinet memiliki 2 program dan 21 kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2015 dan 2019.

Program tersebut adalah yang :

Pertama program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dari Sekretaris Kabinet yang akan digunakan untuk menampung pelaksanaan fungsi dan tugas Kedeputusan bidang administrasi, pusat data informasi dan inspektorat.

Program kedua adalah program penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan yang akan digunakan untuk menampung tugas dan fungsi 4 kedeputusan yaitu Kedeputusan bidang Polhukam, Kedeputusan bidang perekonomian, Kedeputusan bidang Kesra dan Kedeputusan bidang persidangan kabinet.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati.

Terkait dengan agenda rapat yang ketiga yaitu mengenai pembicaraan awal pembahasan APBNP 2015 dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan tanggal 29 September 2014 tentang penyampaian pagu alokasi anggaran kementerian negara lembaga Tahun Anggaran 2015, Sekretariat Kabinet mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.183.078.363.000,- namun berdasarkan surat Menteri Keuangan tanggal 1 Desember 2014 Sekretariat Kabinet diminta untuk melakukan *self blocking* sebesar Rp.4,9 milyar atau sebesar 2,68%. Apabila anggaran *self blocking* tersebut telah disetujui untuk dijadikan penghematan alokasi anggaran belanja maka alokasi anggaran belanja, Sekretariat Kabinet untuk Tahun 2015 akan menjadi Rp.178.173.242.000,-. Jika alokasi anggaran belanja Sekretariat Kabinet untuk Tahun 2015 sebesar Rp.178 milyar tersebut disetujui maka dibandingkan dengan anggaran Tahun 2014 yang sebesar Rp.170 milyar terdapat kenaikan anggaran alokasi belanja Sekretariat Kabinet sebesar Rp.7,1 milyar atau sebesar 4,19%.

Adapun perbandingan alokasi anggaran belanja Sekretariat Kabinet per program sebelum dan setelah *self blocking* di penjelasan tertulis dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 di halaman 10 dan 11.

Berkaitan dengan penggunaan anggaran, ijin kami juga melaporkan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 dari sisi realisasi belanja dan dari sisi pendapatan.

Dari sisi realisasi belanja pada Tahun 2014 pada awalnya Sekretariat Kabinet memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.185 milyar. Namun selanjutnya dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah terjadi perubahan, lalu Sekretariat Kabinet melakukan penghematan anggaran sebesar Rp.14,6 milyar, sehingga alokasi anggarannya turun menjadi Rp.170,9 milyar. Penghematan tersebut dilakukan dengan mengurangi anggaran belanja untuk pembelian ATK, jamuan rapat, pengiriman surat dinas dan lain-lain.

Dari alokasi anggaran sebesar Rp.170,9 milyar tersebut sampai 31 Desember 2014 telah direalisasi sebesar Rp.149,2 milyar atau sama dengan 87,23%. Rincian realisasi anggaran belanja tersebut dapat dilihat pada tabel 3 dalam penjelasan tertulis kami di halaman 12. Nah sebagaimana tertera pada tabel tiga tersebut, penyerapan anggaran belanja pegawai mencapai 94,36%, tingkat penyerapan belanja barang mencapai 79,06%, sementara penyerapan belanja modal sampai dengan akhir Tahun 2014 mencapai 67,38% sehingga realisasi anggaran belanja Sekretariat Kabinet berdasarkan program per 31 Desember 2014 penyerapannya adalah 87,23%.

Sebagaimana data tersebut secara umum dapat kami jelaskan bahwa kurang maksimalnya penyerapan anggaran pada Tahun 2014 terutama pada program dukungan manajemen dan

...disebabkan karena adanya kebijakan penghematan atau efisiensi. ...dukungan kebijakan kepada Presiden disebabkan adanya ...terutama pada sisa anggaran dalam penyelenggaraan kegiatannya persidangan kabinet. Hal ini berdasarkan kebijakan presiden salah satunya terkait pengurangan frekuensi kegiatan dan jumlah peserta. Rincian tentang tingkat penyerapan anggaran belanja untuk masing-masing program sampai dengan 31 Desember 2014 sudah kami sampaikan pada lampiran 2 secara detil.

Selanjutnya terakhir dari sisi pendapatan, dapat disampaikan bahwa Sekretariat Kabinet dalam tahun anggaran 2014 tidak mentargetkan PNBPN karena Sekretariat Kabinet bukan merupakan instansi yang secara khusus mempunyai peranan untuk menghasilkan penerimaan negara. Namun terdapat realisasi pendapatan yang diperoleh oleh Sekretariat Kabinet berupa penerimaan dari pendapatan PNPB lainnya sebesar Rp.160,9 juta. Realisasi pendapatan tersebut kami laporkan dalam tabel 5 penjelasan tertulis pada halaman 14.

Demikian Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati penjelasan yang dapat kami sampaikan pada Rapat Kerja hari ini. Kami mengharapkan kiranya penjelasan kami ini dapat memenuhi harapan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR yang terhormat. Kami juga berharap agar dalam masa-masa selanjutnya kita dapat sama-sama membangun hubungan kerja sama yang erat, mungkin juga dilakukan pertemuan-pertemuan lain yang sifatnya mempererat silaturahmi antara kami di Sekretariat Kabinet dengan para Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR yang kami hormati.

Semoga kerja sama ini merupakan awal dari berlanjutnya hubungan yang akan terpelihara baik ke depan. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Mensesneg atas penjelasannya. Demi menghemat waktu eh Menseskab saya lupa, terima kasih atas penjelasan dan untuk menghemat waktu saya persilakan dari sisi kiri tapi tetap saya minta memperhatikan waktu. Silakan. Tidak ada? Sebelah kanan. Kok tidak ada yang menyampaikan tanggapan? Pak Yandri?

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):

Ya. Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Pak Menteri yang saya hormati beserta jajaran.

Mohon maaf terlambat tadi. Sebenarnya kalau Sekretaris Kabinet ini yang perlu kita perdalam sebenarnya tugas pokoknya Pak Menteri, antara Sekretaris Kabinet dengan Sekretaris Negara, kemudian sekarang ada lembaga baru kalau dulu mungkin UKP4 ya kan, dengan Staf Kepresidenan. Nah dalam hal ini mungkin perlu kita pertajam kembali apakah misalkan pengusulan anggaran ataupun penggunaan anggaran tadi pertama mungkin penghematan apakah itu tidak akan mengurangi kinerja staf? Kemudian dengan adanya Staf Kepresidenan itu apakah tidak ada tumpang tindih Pak Menteri? atau memang sudah ada jobdes yang jelas sehingga itu mungkin pada konsinyering nanti tanggal 6,7,8 itu kita akan lebih melihat betul-betul ada apa namanya perbedaan yang tegas walaupun saya yakin memang tetap ada kerjasama yang tidak bisa dipisahkan antara ketiga ini karena melakukan pada prinsip Presiden *gitu* mungkin itu.

Kemudian mengenai PNBPN ini saya belum jelas betul Rp.160 milyar ini, ini mungkin di Tahun 2014 Rp.160 juta ya? mungkin saya juga tadi belum melihat ataupun belum begitu jelas, mungkin perlu di stressing lagi saya kira itu Pimpinan.

... betul fungsi Sekretariat Kabinet ini apalagi kalau saya tidak
... sil sidang kabinet kepada para menteri. Nah kalau itu yang
... yang di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi ini antara menteri
satu dengan menteri lain yang berbeda pernyataan sikap ataupun pernyataan di pers itu tidak terulang
kembali Pak Menteri, misalkan yang saya pernah sampaikan waktu Mensesneg itu Pak Pratikno
menyampaikan bahwa kartu sehat itu berasal dari CSR, tapi Menkeu mengatakan sudah ada di
anggaran termasuk Pak Mensos misalkan.

Nah ini mungkin yang perlu saya tanyakan sebenarnya koordinasi antar Menteri itu apakah
betul-betul di bawah koordinasi langsung Seskab atau ada peran Staf Kepresidenan atau Mensesneg
Pak Menteri? Saya kira itu Pimpinan. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Endro.

F-GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, MBA):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Menteri yang beserta rombongan yang saya hormati.

Salah satu tadi yang dijelaskan oleh Bapak Menteri bahwa tugas dari Sekretariat Kabinet ini
sesuai dengan Keppres Nomor 82 ini adalah memberikan dukungan staf administrasi teknis dan
pemikiran kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Mohon maaf Pak Menteri, saya sebagai wakil
dari rakyat tentunya ada pertanyaan-pertanyaan dari rakyat, khususnya yang di Dapil saya yang saya
perlu sampaikan karena saya tidak bisa menjawab.

Pertanyaan dari rakyat ini adalah bahwa menteri yang ditunjuk oleh Pak Jokowi, kemudian dari
sini juga data-data yang tentunya adalah orang pakar-pakar, pintar-pintar dan jago-jago di dalam hal
ini, tetapi menghadapi permasalahan akhir-akhir ini, kenapa Pak Presiden dibiarkan cari sendiri seolah-
olah Tim 9, tokoh masyarakat, kemudian ke tokoh-tokoh yang lainnya kok yang namanya kabinet tidak
mendukung, apakah karena memang tidak disiarikan atau bagaimana ini adalah pertanyaan dari
masyarakat, seolah-olah bahwa kabinet itu membiarkan Pak Jokowi ini berjalan sendiri, diputusi
sendiri, minta ini dan sebagainya. Nah ini yang perlu saya mendapat, sehingga nantinya saya bisa
menjelaskan kepada masyarakat, ini yang pertama.

Yang kedua bahwa sebagai Sekretaris Kabinet tentunya tugas-tugasnya adalah
mengkoordinasi Menteri-menteri dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tentunya di sini titiknya
adalah rapat-rapat meeting dan sebagainya, tetapi di sini kelihatannya seperti yang dilaporkan tadi
bahwa biaya-biaya meeting dan sebagainya malah dikurangi, sedangkan para pakar mengatakan
bahwa kelemahan dari kita ini bangsa Indonesia ini dan juga jajaran pemerintahan maupun swasta ini
adalah koordinasi yang masih lemah, dibandingkan dengan negara lain.

Oleh karena itu ketika anggaran ini dikurangi, nantinya yang terjadi apakah tingkat koordinasi
nanti lebih lemah daripada tahun yang lalu atau sama atau bahkan lebih baik, ini yang pertanyaan yang
kedua.

Yang ketiga yang terakhir, bahwa di dalam anggaran menyampaikan menunjukkan bahwa
pendapatan yang bukan pajak ya, pendapatan yang bukan pajak ini Tahun 2014 itu tidak dianggarkan
karena memang bukan penghasil, bukan penghasil. Nah tapi kenyataannya di tahun yang lalu ini sudah
ada Rp.145 juta. Apakah itu merupakan suatu kealfaan karena memang sudah ada kemudian tentunya
lanjutannya pasti ada? Ini sehingga Tahun 2015 ini muncul lagi sehingga berjumlah menjadi 160. Itu
pertanyaan dari saya. Terima kasih.



, M.Si):

**Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II yang saya hormati.
Bapak Menteri beserta rombongan yang saya hormati.**

Saya Azikin solthan, A-395, dari Partai Gerindra, Dapil I Sulawesi Selatan, Makasar dan sekitarnya.

Pak Menteri yang kami hormati. Setelah kami membaca visi dari Sekretariat Kabinet, antara lain akan membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sebagaimana kita ketahui bahwa good governance ini memunyai beberapa indikator, Bappenas menetapkan 14 indikator, Bank Dunia lebih banyak lagi indikatornya, yang antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabel. Saya ingin penjelasan dari Pak Menteri atau Staf indikator-indikator mana yang digunakan oleh Sekretaris Kabinet dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik?

Yang kedua Pak Menteri kami usulkan sarankan agar yang memberikan penjelasan atas nama Presiden sebaiknya dapat ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Kabinet karena selama ini terlalu banyak kementerian yang sering memberikan penjelasan di media atas nama Presiden, karena selama ini kami lihat belum ada juru bicara Presiden yang tetap. Katakanlah kemarin Sekretaris Kabinet menyampaikan informasi tentang Kapolri yang diminta untuk mengundurkan diri di media elektronik ya, Mensesneg sorry Mensesneg ya. Maaf ya.

Yang ketiga Pak Menteri, alangkah indahnya ya. Yang ketiga Pak Menteri, mungkin bisa kami dapat informasi job description antara Sekretaris Kabinet dengan Sekretaris Negara. Terima kasih.

Bilahirbisabilhaq Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

F-PD (SAAN MUSTOPA, M.Si)

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati.

Menteri Sekretaris Kabinet beserta jajaran yang saya hormati.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal:

Pertama terkait dengan rencana strategis yang sudah disusun oleh Menteri Sekretariat Kabinet dan berdasarkan juga Perpres Nomor 82 ada beberapa tugas dan fungsi yang memang menjadi hal yang harus dilakukan oleh Mensetkab Sekretariat Kabinet, misalnya saya ambil contoh poin 3 penyiapan persetujuan, prakarsa, penyusunan, dan penyampaian rancangan Perpres, Keppres, Inpres, serta menyiapkan pendapat dan pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Polhukam perekonomian dan Kesra.

Nah terkait dengan point 3 ini, saya juga ingin mendapatkan penjelasan dari Mensetkab terkait dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh kita semua terkait dengan soal kemelut hukum yang menyangkut Kapolri dan KPK.

Apa saja yang sudah disampaikan oleh Sekretariat Kabinet saran, pendapat, pandangan hukum dan politik, terkait dengan kisruh yang hari ini masih berlarut-larut, bahkan kamipun mendengar dan membaca di beberapa media bahwa Presiden akan menyampaikan hal ini menyelesaikan secara tuntas hal ini sekembalinya dari Malaysia. Sementara persoalan sudah semakin keruh, semakin runyam.

Nah ini saya minta apa penjelasan terkait dengan soal yang sedang kita hadapi. Sama dalam hal memberikan dukungan juga misalnya terkait dengan poin terwujudnya peningkatan kualitas

es, terwujudnya peningkatan kualitas hasil kebijakan, analisis
u tidak tentu kan diuji di lapangan. Ada kebijakan Presiden
an Kapolri dan hasilnya adalah polemik yang berkepanjangan.

Saya ingin juga meminta penjelasan dari Mensetkab terkait soal-soal seperti itu.

Nah yang kedua terkait dengan soal anggaran, tentu Komisi II selalu mensupport dan mendukung mitra-mitra kerja yang ada di Komisi II terkait dengan soal anggaran apakah itu penambahan dan sebagainya, tapi tentu bahwa Komisi II dalam melakukan penambahan anggaran atau dalam menganggarkan selalu berdasarkan kepada basis kinerja, transparansi dan akuntabilitas. Kita ingin bahwa semua mitra kerja kita basis kinerja transparansi dan akuntabilitas itulah yang menjadi acuan kami dalam menyusun anggaran bagi mitra kerja kita, terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet ini. Tentu sekali lagi untuk mendukung semua rencana strategis, untuk mendukung semua kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Sekretariat Kabinet, tentu kita akan mendukungnya selama itu tadi kinerjanya terus membaik, akuntabilitasnya tetap bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan juga ada transparansinya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saya kira perlu saya pindahkan ke sayap kiri dulu. Silakan sebelah kiri.

F-HANURA (Dr. Rufinus HOTMAULANA HUTAHURUK, SH, MM, MH):

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Menyambung tadi permohonan dari Pak Saan tentang rencana apa yang sebenarnya sudah diberikan oleh dari Mensetkab ini di dalam memberikan pandangan, analisa dari sistim perpolitikan maupun hukum kita, cuma saya ingin sampaikan jangan lupa bahwa negara ini menganut sistim ketatanegaraan yang sudah membagi habis kekuasaan. Jadi limitasi Presiden di dalam mencampuri masalah hukum itu harus perlu diperhatikan. Tidak semua hak prerogatif itu menyangkut masalah-masalah hukum seperti perseteruan KPK dengan Polri. Jadi tolong ini saya ingatkan supaya nanti di dalam memberikan analisa kepada Presiden memperhatikan substansi yang paling dasar.

Kemudian yang kedua saya ingin karena di Komisi II ini lebih kepada mengarah kepada masalah tata ruang ini Pak, saya minta nanti kalau mohon maaf ini Pak Menteri supaya handphone beliau ini Pak Yuli Harso diberikan ke kita, karena dia membidangi tata ruang dan wilayah perbatasan. Komisi II sangat concern di masalah ini.

Jadi mungkin nanti kami akan elaborasi sampai sejauh mana sebenarnya masalah perbatasan dan tata ruang ini sudah diberikan masukan kepada Presiden untuk bisa dirilis melalui Kementerian Agraria maupun Tata Ruang. Saya akan lebih concern ke masalah itu dan saya tidak tahu ini kalau saya lihat ini Pak menteri kolo hanya sekedar dukungan-dukungan terus tidak diberikan kebijakan kepada beliau ini mengambil satu posisi yang strategis, saya khawatir nanti ini hanya dukungan-dukungan terus, kita tidak bisa bergerak. Jadi dalam kaitan ini dengan masalah anggaran juga harus mungkin ada improvement di sini, karena masalah perbatasan dan tata ruang merupakan satu nomenklatur yang baru, yang mungkin di Setkab ini harus diberikan ruang yang lebih luas. Jadi bukanlah sekedar memberikan dukungan atau analisa malah mungkin pengambil keputusan, karena menyangkut negara, perbatasan dengan negara luar, perbatasan dengan daerah-daerah lain. Jadi coba nomenklatur ini akan mengubah *structure finance* yang diberikan kepada Komisi II ini.

Jadi tolong ini menjadi perhatian, karena Komisi II menyangkut masalah hal-hal yang seperti ini, kami mohon mungkin ada pandangan yang lain dari Pak menteri

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabrakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya Pak. Sebelah kiri? Kembali lagi sebelah kanan.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Ya Pak, Saya Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua.

Bapak Sekretaris Kabinet serta jajaran yang kami hormati.

Para Anggota yang mulia.

Dimulai dari apa yang disampaikan Pak Saan tadi selama menjadi Anggota Komisi II, 5 tahun lebih sampai sekarang, saya baru mendengar pertanyaan jenius tersebut dari Pak Saan ini. Ya memang pertanyaan yang menurut saya pertanyaan penting, tapi tidak bisa dijawab itu. Yang saya ingin katakan juga sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rufinus tadi, Sekretaris Kabinet ini pembantu Presiden, yang mengambil keputusan semuanya Presiden. Nah karena itu sifatnya Sekretaris Kabinet ya memang memberikan dukungan. Nah dukungannya kira-kira bentuknya ya seperti ini. Dulu sama ketika zaman Pak Dipo Alam kita tanya Pak tentang berbagai hal yang itu menjadi Tupoksinya dari Sekretaris Kabinet, jawabannya juga sederhana. Kami sampaikan kepada Komisi II, tapi tentu tidak semua bisa kami sampaikan, karena ada yang bersifat sekedar masukan dan itu keputusannya ada di Presiden.

Jadi artinya supaya nanti tidak salah tafsir. Kalau Sekretaris Kabinet, Sekretaris Negara memberikan masukan itu kan belum tentu mencerminkan sikap pemerintah secara utuh. Loh iya, jadi ini ketatanegaraan, kecuali kita memang bermaksud mengadu domba antara menteri dengan Presiden, lah itu masalah ya kan. Masalah nanti begitu.

Nah saya kira apa yang dijelaskan oleh Sekretaris Kabinet itu tentang tugas pokok dan fungsinya memang sudah seperti yang diatur di dalam Perpres dan sebagaimana lazimnya selama ini bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsinya tersebut. Nah saya kira kisi-kisi saja yang paling penting dan penegasan tentang kedudukan, posisi, peran tugas dari Sekretaris Kabinet yang membedakan dengan Sekretaris Negara. Nah saya kira ini penting karena dulu ada ide bahwa Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara itu jadi satu saja *gitu*, nah kadang kala juga pada masa yang lalu kita juga bingung, mungkin sebagian juga masyarakat tidak atau diantara kita tidak clear apa yang menjadi porsi dan peran ya. Tentang berbagai isu yang ada di pemerintahan dan mana yang memang porsinya itu menjadi kewajiban dari Sekretaris Kabinet untuk menjelaskan, Sekretaris Negara untuk menjelaskan, Menteri Hukum dan HAM untuk menjelaskan, seperti itu kira-kira.

Nah itulah melalui Ketua kepada Pak Sekretaris Kabinet, saya kira perlu memang ditegaskan batas-batas mana Sekretaris Kabinet itu memang memiliki peran-peran tertentu, pada batas mana memang bukan menjadi perannya, termasuk apakah semua masukkan dukungan analisis kebijakan dan sebagainya memang harus disampaikan kepada publik atau tidak, supaya clear karena toh kalau toh disampaikan kepada publik, itu juga harus dipahami dengan baik bahwa itu bukan merupakan keputusan. Keputusan tetap ada di Presiden. Jadi saya kira dalam konteks menjaga keselarasan pemerintahan dan menghormati serta menghargai sistem presidentil, kekuasaan itu ada di Presiden, seluruh menteri dan lain sebagainya adalah membantu Presiden, maka keputusan akhir ada di Presiden, penjelasan yang resmi ada di Presiden, kecuali memang didelegasikan kepada para pembantu.

KETUA RAPAT:

Pak Sa'duddin.

F-PKS (Dr. H SA'DUDDIN, MM):

Ya Pak, Baik. Saya dulu Pak.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Pimpinan Komisi yang saya hormati.

Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Rekan-rekan Anggota Komisi yang saya cintai.

Bapak Ibu sekalian. Kita memahami bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan tunggal setelah mendapatkan masukan-masukan sebagai pimpinan kepala negara. Dia punya hak otonom penuh mengambil kebijakan-kebijakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Setkab adalah bagian dari staf Presiden yang memberikan masukan, yang memberikan dukungan dari segala aktivitas yang dilakukan oleh Presiden. Saya sampai saat ini ada yang banyak bertanya tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden contoh masalah ekonomi. Sebetulnya masalah ekonomi yang memberikan masukan adalah Setkab tentang hal ini dan lain sebagainya.

Yang terjadi hari ini seperti menaikkan harga BBM, ketika dia menaikkan harga BBM dan hari ini telah turun angka BBM, harga BBM-nya turun, tapi harga di pasaran tidak turun. Nah di sini yang tidak kita pahami kenapa itu bisa tiba-tiba menaikkan angka harga BBM, padahal punya staf masukan dan sebagainya, bahkan pada saat itu kita dengar ada tim yang akan mengkaji tentang BBM itu sendiri dan lain sebagainya, tapi ternyata diberikan pengumuman dan sebagainya akhirnya begitulah jadinya.

Nah sekarang yang terjadi angka BBM turun tapi harga di pasaran tidak turun, itu yang ditanyakan oleh masyarakat yang terjadi hari ini, dan kita tahu bahwasanya kesejahteraan yang dimiliki oleh rakyat adalah hak Presiden yang memberikan kesejahteraan, kewajiban sebagai Presiden memberikan kesejahteraan. Yang terjadi hari ini yang kita lihat perlu penanganan yang serius oleh Presiden itu sendiri, bahkan hari ini kita tahu Pak Presiden sudah blusukan ke sana ke sini. Bahkan yang terjadi hari ini juga yang dulu sebelum beliau menjadi Presiden punya FB dan tweeter, tapi konon katanya hari ini ada informasi twitter-nya tidak ada dan FB-nya tidak ada. Siapa yang benar ini, di mana kuncinya? yang menyatakan ini tidak ada dan kenapa ini bisa hilang, padahal sesungguhnya dia punya dan memang sebagaimana kita ketahui sebelumnya Presiden Pak SBY punya twitter dan punya FB, mohon penjelasan agar kami bisa memahami tentang hal itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yang bertanya itu barusan Pak Sa'duddin yang tadi belum saya perkenalkan, dari Fraksi PKS. Dapil Kerawang, Bekasi, mantan Bupati Bekasi juga. Berikutnya.

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKARIE, SH, MM)

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Selamat sore.

serta staf.

Pertama yang mungkin berkaitan dengan masalah supaya jangan sampai terjadi berbagai macam benturan di antara satu dengan yang lainnya diantara kabinet mungkin perlu ada menunjuk jurubicara kepresidenan. Saya lihat dari zaman Pak Harto pun sampai yang lalu-lalu ada, supaya ada betul-betul suara bulat antara satu dengan yang lain, tapi saya tidak terlalu konsen ke situ.

Berkaitan dengan ini yang kebetulan ini Menseskab saya ini kebetulan dari daerah perbatasan. Dulu kita, saya cuma ingin tanya kebetulan kita ini belum ada Rapat Kerja, tapi ini ada kaitannya juga dengan pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan juga APBNP, dulu itu saya masih ingat pada waktu saya masih DPRD provinsi dalam rangka kita mengatasi kesenjangan, karena daerah perbatasan itu pendekatannya dari dulu itu pendekatan security-nya yang menjadi utama, pendekatan keamanannya. Sehingga kalau kita masuk ke perbatasan kita dengan perbatasan negara luar, negara kita itu nampak benar macam tidak aman, tetapi kan seharusnya pada waktu itu kita memberikan solusi dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan yang utama harus diperhatikan kesejahteraan setiap keterbatasan, maka selain dari keamanan pendekatan ekonomi, maka pada waktu itu zaman Pak SBY dari periode pertama sampai masa kedua kita mengusulkan walaupun semacam daerah otoritas perbatasan itu, tetapi tetap bertanggung jawab Pemerintah pusat dalam rangka pendekatan itu, itu berkali kali bahkan Pak SBY terakhir mengatakan sudah sampai Seskab, cuma saya ada kabinet sekarang ini ingin tahu apakah memang sudah ada pelimpahan itu, bagaimana kelanjutannya karena tentu akan ada kaitannya dengan APBN yang sedang kita sikapi bersama.

Kemudian yang ketiga apa yang kedua mungkin organisasi, daerah perbatasan juga perlu dipikirkan oleh Sekretaris Kabinet karena kalau saya lihat selama ini perbatasan itu sulit untuk merealisasi program-program perbatasan itu, karena ada ego sektoral, karena Ketuanya itu Menteri Dalam Negeri mungkin Menteri Dalam Negeri untuk memanggil Menteri PU, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan berkaitan dengan daerah perbatasan ini kan kesulitan, kenapa hendak organissai itu dinaikkan kalau bukan presiden tapi wapres, mungkin Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua hariannya, yang melaksanakan tugas sehari-hari tetapi itu ditarik, kepada tingkat di atasnya sehingga bisa mengkoordinasikan dalam rangka percepatan pembangunan daerah perbatasan itu. Karena saya melihat, salah satu juga sisi kan, di dalam ini termasuk struktur yang di apa salah satu fungsi dari Seskab.

Saya pikir itu saja pimpinan, terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Budiman, setelah Pak Budiman baru Pak Agung

F-PDIP (BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil):

Terima kasih.

Pimpinan dan Sekretaris Kabinet serta jajarannya;

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Saya Budiman Sudjatmiko dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Jawa Tengah 8, kebetulan di sini di scrin ini ada visi dan misi Setkab saya tertarik ingin mengutip misinya memberikan

kabinet pada presiden kok malah dimatikan, ya nyalain kabinet kepada presiden dengan memegang teguh pada prinsip beberapa kali saya membuat pernyataan bahwa Presiden seharusnya menjadi pemimpin dan Menteri-menterinya menjadi manajer dan saya kira juga pada awal-awal Pak Jokowi, Pak Presiden mengatakan tidak ada namanya program Menteri, adanya program pemerintahan Jokowi-JK artinya jelas bahkan pada program pun Menteri dia hanya menjadi sub dari visi misi presiden. Karenanya tentu saja, kabinet ini harus lebih ketat lagi wong program sendiri saja tidak boleh pernyataan politik terlebih-lebih juga tidak boleh seharusnya, baru-baru ini saja, kita mendengarkan kabar 2 Menteri, salah satu Menterinya Pak Sesneg berbicara, saya tida bicara kasusnya berbicara tentang soal Calon Kapolri, saya tidak mau bicara kasusnya, tak lama kemudian ditanggapi oleh Menteri Polhukam yang kontradiktif itu tidak ngomong program, itu ngomong yang lebih rendah lagi dari pada program, sikap politik bahkan mungkin selera politik wong program sendiri saja tidak boleh ini kok selera politik, terhadap satu isu dari 2 menteri yang menurut saya strategis, semua Menteri Strategis, tapi Sesneg bersama dengan Menko Polhukam.

Pertanyaannya apa yang akan dilakukan oleh Setkab untuk menjadikan peristiwa kemarin terakhir tidak terulang lagi, apalagi sekarang ini bisa menegement karena Menteri kan seperti yang saya katakan tadi harus disiplin, beda dengan kami. DPR ini kan dalam tanda kutip "kita punya hak konstitusional untuk membully dan ngomong apapun" ya kan, punya hak konstitusional untuk membully, itu juga hak Menteri juga untuk tidak menjawab juga kalau memang tidak pas. Ya, tapi hak Mmenteri juga untuk tidak menjawab, kalau ireleva, itu benar saya sepakat dengan anda kok, tenang saja, tapi intinya adalah, intinya adalah bagaimana ini dicegah ke depannya, tidak, ini harus di cegah untuk tidak terjadi lagi selera politik membantu-bantu presiden di kemukakan dan bahkan saya kira tidak baik, saya kita itu saja, terima kasih.

Wassalamua'laikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Maaf Pak Budiman dari Fraksi?

F-PDIP (BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil):

Sama dengan Pak Arif Pak.

KETUA RAPAT:

Mempertegas saja saya.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si):

Terima kasih,

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Sederhana saja Pak, kami ingin tanya tidak galak-galak seperti mas Budiman dan pertanyaan Pak Budiman tadi tolong nanti dijawab Pak Menteri, jangan Pak Arif yang jawab begitu pak. Kami meskipun terlambat, tadi mencoba mengikuti paparan visi dan misi yang sudah sampaikan oleh Menseskab, dalam pemahaman kami yang cukup sederhana Menseskab beserta jajarannya ini adalah pikiran, mata, telinga, ucapan, dan tindakan presiden, *Suporting Yudith* penuh, dalam mata anggaran yang ada ini kami lihat ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan.

...olaan pengembangan pegawai serta pengkajian penyusunan
...na dilingkungan Seskab ini sampai dengan 100 milyar lebih,
...kebijakan-kebijakan terkait dengan kepegawaian, di Republik
Indonesia ini masih belum ada tanda-tanda menuju ke arah kebaikan, kasus Honorer K2 dan sebagainya.

Anggaran sebesar 111 milyar lebih ini kalau kami lihat sifatnya studi ya, pengembangan-pengembangan, kira-kira anggaran ini apakah nanti memiliki ukuran-ukuran kinerja yang menuju ke arah kebaikan itu, itu satu.

Kemudian yang kedua di tabel 5 ini pertanyaan titipan dari fraksi sebelah, tetangga sebelah, karena tidak sampai hati katanya mau tanya. Di tabel 5 halaman 14 di sana ada pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan, yang nominalnya hanya Rp. 2,440.000,- kalau tidak salah baca dan menafsirkan, ini mohon penjelasan barangnya di mana, gedung apa, luas nya berapa? kok semurah itu. Kalau memang benar dan tidak salah baca tetangga saya sebelah ini mau sewa gedung kantor itu, jangan sampai dijual seperti isu yang berkembang mengenai gedung Kementerian itu.

Saya rasa sementara itu pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kembali ke sayap kiri, masih ada tidak sayap kiri

F-PAN (AMRAN, S.E.):

Satu, sedikit pak

KETUA RAPAT:

Ada tidak? silakan Pak Amran.

F-PAN (AMRAN, S.E.):

Terima kasih pimpinan,
Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati.

Mungkin saya hanya fokus pada persoalan anggaran, menyambung apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sudjatmiko dengan rekan saya di belakang tadi tentang penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan, ini ada anggaran di sini sekitar 20 milyar, kemudian kalau saya lihat di lampiran itu di halaman 2 itu sudah dirinci di sini ya ada berapa di sini, di antaranya penyelenggaraan dukungan kebijakan presiden di bidang pemberdayaan masyarakat, kemudian penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di bidang perancang Undang-Undang, untuk bidang kesejahteraan rakyat.

Kadang kala Pak Menteri saya bertanya tanya dari tahun ke tahun anggaran bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat itu, itu puluhan trilyun, bahkan kalau tidak salah di 2013-2014 itu hampir sekitar 90 trilyun, yang tersebar di 16 atau 17 kementerian atau lembaga. Yang menjadi pertanyaan kemana saja anggaran yang sebesar itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat? apakah sering saya bertanya apakah ada apa namanya signifikansi antara anggaran dengan pengurangan angka kemiskinan, nah siapa yang men sinkronisasi anggaran anggaran bantuan sosial itu yang tersebar di kementerian yang ada. Setelah saya lihat di sini ini yang memberikan dukungan kebijakan Presiden, dibidang pemberdayaan masyarakat apakah ini masuk dalam poin itu, memberikan

ya, kan ini dukungan kebijakan, kadang kala saya bertanya, any dia tidak bisa menjawab. Sehingga kita tahu betul bahwa program dijalankan oleh pemerintah ini betul-betul katakanlah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dan pemberdayaan itu bisa tepat sasaran. Salah satu contoh lagi untuk bidang pemberdayaan misalnya yang teknis di lapangan katakanlah di kementerian A, katakanlah di Kementerian Pertanian itu punya pemberdayaan masyarakat, di Kementerian Sosial punya pemeran masyarakat, di kementerian yang lain juga pemberdayaan masyarakat, pada pelaksanaan di lapangan, itu satu apa namanya satu obyek itu bisa mendapat lebih dari 3 program sedangkan yang lain tidak mendapat ya ini, sehingga saya kata oh mungkin karena ada ego sektoral di antara kementerian lembaga yang masing-masing menjalankan programnya dan tidak ada koordinasi apakah Setkab masuk dalam posisi ini, kalau masuk dalam posisi ini, ini dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan presiden ini, ini saya minta penjelasan dalam bentuk apa? untuk anggaran yang ada ini, sebesar 20, ya sekitar 20 milyar ini. Saya kira itu saja pimpinan.

Bilahittaufiq Walhidayah Wassalami'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, dari Anggota Komisi cukup ya? mewakili fraksi PKB silakan Pak Lukman Edy. Pimpinan atau Fraksi PKB?

F-PKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si):

Sudah ada Pak Yanuar itu dari Fraksi PKB.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Pak Ketua memerintahkan ya,

Pak Menteri yang kami hormati beserta seluruh tim;
Pimpinan serta anggota komisi II;

Sebelumnya kami berterima kasih kepada forum ini yang memberikan ruang kita untuk berkenalan jajaran Kementerian Sekretaris Kabinet lengkap dengan semua timnya apa namanya dan pakai label yang lengkap begitu ya? khas istana ini, kemudian teman-teman juga bisa berkenalan, dan dalam forum ini tentu kami mendo'akan supaya Pak Menteri diberikan kesehatan yang prima ya? karena melayani presiden dengan mobilisasi yang tinggi seperti Pak Jokowi ini tentu membutuhkan energi yang banyak ya? energi yang besar, oleh sebab itu kami mendo'akan supaya terus diberikan kesehatan yang yang prima kepada Pak Menteri.

Nah jadi Pak Menteri disamping menjaga kesehatan, ya santai-santailah pak, jangan terlalu serius-serius yang mengerenyitkan dahi terus ya? santai *gitu* tapi serius ya. Seperti katanya apa namanya Warung Kopi, Warkop itu santai tapi serius sersan, karena negara dan bangsa ini membutuhkan peran serta Pak Menteri itu besar sekali, tanggungjawab dan supporting kepada Bapak Presiden tentu yang utama dari Pak Menseskab.

Yang kedua Pak Menteri paling tidak akhir-akhir ini ada 2 momentum yang gaduh, yang gaduh sebagian publik menilai, adalah kurangnya suport dari jajaran Kesekretariatan Kabinet memberikan pertimbangan yang matang kepada presiden, sehingga presiden mengeluarkan kebijakan yang gaduh itu.

ketika awal-awal soal nomenklatur sebelum Presiden hingga kemudian terjadi pingpong Istana, Senayan, Istana,

Kegaduhan kedua seperti teman-teman bilang tadi soal yang akhir-akhir ini, saya kira mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan yang menyita perhatian publik mengeluarkan energi yang begitu besar untuk membahas persoalan ini. Walaupun media menjadi ratingnya menjadi tinggi tapi paling tidak sebagai seorang yang membantu Presiden tentu berharap tidak seperti ini, kedepan mudah-mudahan keharmonisan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden tentu dengan pertimbangan pertama, tangan pertama, ring pertama memberikan pertimbangan adalah Saudara Menteri Sekretaris Kabinet.

Kalau misalnya kebijakan-kebijakan itu murni adalah soal apa namanya soal pertimbangan politis misalnya, pertimbangan politis misalnya, ya mungkin apa namanya sepenuhnya kita menyatakan itu menjadi tanggung jawab Presiden, tapi kalau kemudian kebijakan-kebijakan itu ada salah satu yang memberikan kontribusi timbulnya implikasi adalah karena kekeliruan kita dalam mempertimbangkan soal administrasi saya kira itu menjadi tanggung jawab Menteri Sekretaris Kabinet ya menjadi tanggung jawab Sekretaris Kabinet. Nah oleh sebab itu saya kira ke depan mudah-mudahan dengan kesehatan yang prima ya, dengan kecerdasan Pak Menteri, dan dukungan dari staf-staf Kementerian Sekretaris Kabinet ini, itu ke depan kita bisa perbaiki lagi, supaya kegaduhan-kegaduhan itu semakin lama yang tidak produktif ya, kalau gaduhnya produktif saya kira kita support jugalah, tapi kalau gaduhnya tidak produktif saya kira ini tidak perlu kita ulangi lagi.

Terus yang kedua soal anggaran ya kami mudah membaca dan memperhatikan tadi apa disampaikan oleh Pak Menteri dan kita memberikan dukungan lah, memberikan dukungan termasuk upaya secara terus menerus dari jajaran Kementerian Sekretaris Kabinet untuk melakukan efisiensi yah, sedikit memang efisiensinya, kecil memang kalau dilihat dari jumlah rupiahnya, tetapi pengaruhnya yang besar. Karena begitu jajaran Sekretaris Kabinet punya visi, efisiensi, itu akan menjadi contoh bagi jajaran-jajaran yang lain ya? memberikan tauladan bagi jajaran-jajaran yang lain, efisiensinya kalau dari angka ini ya, 10 milyar, 20 milyar, itu kecil sekali tetapi ini akan memberi pengaruh yang multiplier efek kepada jajaran sampai kepada jajaran pemerintahan daerah kalau apa namanya Kementerian Sekretaris Kabinet ini bisa melakukannya dengan baik.

Nah, oleh sebab itu kita memberikan dukungan lah dan saya pikir tidak ada usulan penambahan anggaran ya? tidak ada usulan penambahan anggaran, ya kita apa namanya, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu apa, sulit kita untuk menyetujuinya.

Nah yang ketiga kemaren soal ini juga belum mendapat tanggapan dan belum mendapat jawaban yang yang pas dari Menteri Sekretaris Mensesneg. Oleh sebab itu kami ingin menanyakan juga kepada Pak Menseskab ini, mudah-mudahan mendapatkan jawaban yang bagus yang pas ya, soal staf kepresidenan ini pak, karena di anggarannya Sekretaris Mensesneg itu tidak muncul juga di anggaran Menbseskab ini bagaimana? supporting untuk staf kepresidenan ini. Saya kira Bapak Menteri perlu menjelaskan bukan saja soal anggarannya yang seperti saya pertanyakan tadi, tapi juga dimana rencana strukturnya ini seperti apa? ya memang kepala stafnya yang ditunjuk itu konglomerat, tapi kan tetap harus didukung oleh anggaran, anggaran negara ya, dalam rangka menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Presiden, yang diberikan oleh Presiden, enggak, sekarang lebih terkenal konglomerat daripada mantan jenderal pak, tidak ada artinya mungkin supporting dari APBN, tapi tetap sebagai seorang yang di tugaskan oleh Presiden tentu apa namanya berimplikasi kepada beban negara melalui APBN ini perlu dijelaskan, perlu di jelaskan kami justru curiga kalau misalnya diangkat sebagai kepala staf kepresidenan tetapi tidak muncul di anggaran, karena mungkin sudah mampu membiayai sendiri, tapi ini menurut kami penyimpangan kalau kemudian apa nama tugas-tugas kalau staf Kepresidenan dibiayai oleh sendiri, nah ini kan justru berbahaya.

Nah mungkin saya silap atau tidak bisa membaca secara mendalam tapi tolong ini dijelaskan, termasuk struktur, rencana struktur dan segala macam posisinya di manakah?

...al tadi, kami mengapresiasi bahwa hari ini presiden tidak
...kat utusan khusus, sehingga mampu melakukan penghematan
...kan dalam struktur kepresidenan kita. Nah, fungsi-fungsinya
saya kira ini kita apresiasi lah, kita dukung ya? kita dukung. Karena selama ini juga ya itu tadi
kegaduhan sering juga muncul dari situ saya kira pertimbangan Pak Presiden salah satunya yang bisa
saya tangkap adalah dalam rangka untuk menghindari kegaduhan-kegaduhan dari ruang itu dari ruang
staf khusus. Dari ruang utusan-utusan khusus ya? Nah ini tentunya dengan tujuan untuk membangun
keharmonisan selama 5 tahun kepemimpinan Presiden sekarang.

Saya kira itu berapa hal Pak Ketua yang ingin kami sampaikan Terima kasih atas
perhatiannya.

***Wallohulmuafiq Illaquaminthoriq
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakaturh.***

KETUA RAPAT

Pak Mensesneg itu barusan adalah nasihat dari mantan Menteri Tertinggal yah, oh Daerah
tertinggal, maksud saya mohon maaf, pendapat salah satu pimpinan komisi II, Pak Mustafa ada yang
mau di sampaikan silakan.

WAKIL KETUA (H. MUSTAFA KAMAL, S.S./F-PKS):

Ini sedikit sebetulnya harusnya pindah ke belakang dulu ya? tapi ini sebagai pimpinan lebih
kepada bagaimana korelasikan dengan rapat-rapat sebelumnya dari kementerian yang terkait, dan saya
coba supaya kerangkanya tidak ke luar dari apa yang diisampaikan Pak Arif dan Pak Budiman
Sudjatmiko. Jadi betul-betul kepada substansi materinya.

Pertama panggilan Pak Andi ini sekarang jadi ini Pak Menteri atau Pak Setkab atau Seskab,
Seskab, nomenklatur ini penting Pak, bapak ibu sekalian tadi ada yang menyebut Menteri, ada yang
menyebut apa. Jadi Seskab (Sekretaris Kabinet) ini nomenklatur yang resmi, dan saya kira kebetulan
saya dulu membahas Undang-Undang Kementerian Negara, jadi memang sudah dibuat ketat dulu,
semangatnya adalah untuk melakukan dorongan ke arah Zaken kabinet yang ramping sebetulnya,
dalam rangka pemerintahan yang lebih efisien dan efektif ada Kementerian di Pasal 12 yang harus ada,
tersirat begitu Menlu, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. Lalu di Pasal 13 memang di buka
untuk perkembangan lingkungan strategis tingkat global, kementerian-kementerian dengan
nomenklatur yang lebih antisipatif ya?

Di Pasal 14 itu disebut dapat membentuk Menko dulu hampir-hampir dalam pembahasannya
kita ingin menghilangkan, tidak perlu lagi ada Menko, kenapa? karena supaya Presiden dan Wakil
Presiden langsung. Bersentuhan dengan Menterinya, tidak lagi dibuat jarak-jarak yang
berkepanjangan, tapi kemudian komprominya akhirnya tulis dengan kata "dapat" dan kali ini dapat ini
kelihatannya memang dimanfaatkan pada postur kabinet sekarang menjadi bahkan Menko nya ada
ada 4, tapi dikunci di Pasal 15 memang Kementerian itu harus paling banyak 34 apakah penamaan
Seskab ini karena memang sudah tidak boleh lagi, ada nama kementerian lalu disebut Seskab atau ada
alasan lain itu pertanyaan saya yang pertama.

Karena ini dari nomenklatur ini nanti akan kemudian kita mencoba memahami bersama di
komisi II ini jadi Seskab ini kira-kira dia apakah setara Kementerian atau bagaimana? atau bagaimana
itu tolong dijelaskan oleh Pak Menteri. Yang pertama, Pak Seskab. Ya Pak Seskab, ini mohon maaf.

Kemudian yang kedua Pak Jokowi dalam arahnya di kabinet yang pertama kali, di rapat
Paripurna Kabinet itu yang saya dengar beliau menekankan sekali agar tidak terjadinya ego sektoral.
Kebetulan di Komisi II ini ada 2 Kementerian yang kita sedang berusaha memahaminya kira-kira bidang

Di satu kementriannya, Kementerian Dalam Negeri sudah minta Desa itu agar tidak berpindah dari Direktorat Jendralnya. Yang kementerian yang terkait lainnya yaitu kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mungkin akan dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan, mumpung ada Pak Seskab di sini, kami juga ingin, mendapatkan, informasi, dalam menejemen kekabinet, ini manejemen bukan politisnya, saya tidak mau masuk itu sesuai dengan arahan Pak Arif dan Pak Budiman ya, jadi menejemen ini sepertinya seperti aman, seperti apa sebetulnya? jadi pembagian tugas yang sudah diputuskan melalui Keppres itu seperti apa yang sebenarnya, lalu kemudian kira-kira nanti koordinasi kerjanya depan seperti apa? Kedua kementerian ini apakah ada dalam satu Menko atau tersebar di beberapa Menko, jangan-jangan koordinasi hanya di komisi II ini nanti, karena kalau di pemerintahan tidak bisa koordinasi ya misalnya, jangan-jangan kan ini. Jangan-jangan ini mumpung bisa diklarifikasi .

Lalu Yang terakhir karena struktur kabinet sekarang ini cukup besar ya? dengan 4 Menko itu maka alur pengelolaannya seperti apa sehingga nanti dalam menejemen pengelolaan kabinet ini presiden bisa mempunyai rentang kendali yang optimal, terhadap menteri-menteri di bawahnya. Saya ingatkan sekali lagi dulu dalam semangat pembahasan di Undang-Undang Kementerian Negara itu sebetulnya menginginkan kabinet yang ramping, di mana presiden bisa bersentuhan, berkomunikasi secara intensif dengan menteri, teknis langsung. Nah sekarang dengan tadi saya katakan sudah ada Menko "dapat" dapat ya jadi 4 bahkan sekarang ini lalu ditambah lagi, nah ini sekaligus saya juga tanya ada Mensekneg, Mensesneg ya? lalu kemudian ada Staf Kepresidenan begitu ya? disebut bagaimana Kepala Staf Kepresidenan, nah kemarin Pak Mensesneg kita sudah tanya di sini, dan jawabannya ya ada 3 saya sebut, yang pertama itu ya tapi masih ada tumpang tindih dengan Seskab beliau menyatakan sendiri, yang kedua saya agak lupa, tapi yang terakhir ini beliau sebut ya kira-kira begitulah. Jadi saya garis bawah, ada kira-kira begitulah, biasanya kalau orang Jawa itu bukan kira-kira kan? tapi saya rasa, begitu kan, kalau orang Jawa, kalau orang Sumatera seperti Pak Lukman Edy, tadi saya kira, saya kira, kan harusnya kalau orang Jawa, saya rasa tapi kemarin beliau tidak pakai perasaan kira-kira begitu kira-kira itu ya begitulah, saya kira ini kan, nah pakai kira saya juga akhirnya ini ini karena saya dari Sumatera Selatan, ini kan harus tegas, kebetulan sekarang ini Pak Setkab, Pak Seskab saya kira di sini harus dijelaskan supaya kita nanti tahu definisi masing-masing dan mudah-mudahan tidak pakai rasa dan kira-kira lagi begitu.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Demikian Pak Menteri, silakan di jawab, yang harus dijawab, tadi Pak Arif mengingatkan, kalau yang tidak perlu dijawab ya jangan dijawab, begitu kalau tidak salah ya? ya silakan juga di klarifikasi dan rapat ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini rapatnya terbuka untuk umum. Silakan.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si):

Pindah belakang sementara, jadi pemain belakang pak. Jadi pemain belakang pak.

WAKIL KETUA (MUSTAFA KAMAL, S.S./F-PKS):

Ini kejadian yang kedua kemarin juga rapat di sini sama, Menterinya terpaksa pindah ke belakang.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si):

Maju, mundur, maju, naik, turun.

... saya hormati,

Saya mencatat ada 17 topik bukan 17 pertanyaan, 17 topik saya akan berusaha menjawab satu persatu dengan kerangka waktu yang...(suara tidak jelas)

Yang pertama tentang pembagian tugas antara tiga institusi yang berada di Istana Kepresidenan yaitu Sekneg, Setkab, dan Kepala Staf, penting untuk dicatat bahwa dari ketiga institusi ini yang berstatus Menteri hanya Menteri Sekretaris Negara, saya tidak bisa sebetulnya disebut sebagai Menseskab sebutan formal yang bisa dikenakan ke jabatan saya adalah Seskab, Sekretaris Kabinet. Demikian juga dengan Kepala Staf sebutan formalnya Kepala Staf, jadi nanti aneh kalau Menteri, Kepala Staf. Karena kami berdua Seskab dan Kepala Staf adalah pejabat setingkat Menteri yang mendapat fasilitas-fasilitas setingkat Menteri dalam pembentukan, terutama kepala staf sudah di usahakan dan tampaknya sudah bisa adanya deferensiasi fungsi antara Sekneg, Setkab dan Unit Kerja Kepresidenan.

Sekneg pada dasarnya bertugas untuk mengawal presiden sebagai kepala negara. Dengan tugas mengawal presiden sebagai kepala negara, misalnya Sekneg yang berurusan ketika presiden akan melakukan hubungan dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Seperti DPR, MPR, MA dan seterusnya. Sekneg juga yang memiliki tugas untuk membantu Presiden misalnya dalam penetapan pejabat-pejabat tinggi utama di mana posisi presiden misalnya sebagai panglima tertinggi, jadi pada saat presiden ingin menetapkan panglima TNI, ingin mengangkat kepala staf angkatan atau hal-hal yang berurusan dengan TNI, itu adalah ruang kerjanya Sekneg. Hal yang sama berlaku untuk kepolisian. Kepolisian maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara pencalonan, pengangkatan, pemberhentian, Kapolri itu merupakan tugas langsung Presiden sebagai kepala negara, kewenangan untuk mengurus aturan-aturan formal yang dibutuhkan untuk itu adalah berada di lingkungan Sekretariat Negara. Jadi pada dasarnya ingin saya tegaskan bahwa Sekneg berfungsi untuk mengawal Presiden sebagai kepala negara.

Seskab bertugas mengawal Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam hal ini hubungan formal saya itu cuma Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet kerja, itu hubungan formal saya, saya bertindak membantu presiden untuk mengelola kebijakan-kebijakan presiden yang dihasilkan dalam sidang-sidang atau rapat-rapat terbatas kabinet, dalam kondisi yang normal, yang prosedurnya sudah ditetapkan oleh presiden dan wakil presiden, setiap bulan kami mengadakan satu sidang kabinet Paripurna itu adalah Minggu pertama setiap bulan, lalu rapat terbatas bidang Polhukam, itu Minggu kedua setiap bulan, rapat terbatas bidang PMK itu juga Minggu kedua setiap bulan, rapat terbatas bidang perekonomian Minggu ketiga setiap bulan, Rapat terbatas yang Kemaritiman Minggu ketiga setiap bulan, Minggu keempat tidak di agendakan untuk melakukan rapat, memberikan kesempatan baik bagi presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri, untuk melakukan kunjungan kerja, apakah ke daerah maupun ke luar negeri. Itu rutinitas yang diciptakan selama 3 bulan ini dan hari yang diplot untuk melakukan sidang kabinet maupun rapat adalah hari Rabu setiap Minggu, jadi seperti hari ini tadi pagi ada sidang kabinet Paripurna lalu dibahas beberapa isu, Minggu depan hari Rabu, Minggu depannya lagi hari Rabu.

Dalam kondisi normal, tugas saya sebagai Seskab adalah kemudian memastikan bahwa arahan presiden dalam rapat-rapat kabinet tersebut sampai ke menteri-menteri dan menteri-menteri melaksanakannya dan melaporkan hasilnya kembali ke Presiden. Kami di Setkab saya sebagai Seskab tidak punya kewenangan eksekusi, tidak punya kewenangan mengambil keputusan, tugas kami membantu presiden dalam mengelola kabinet. Tadi ada tugas-tugas misalnya memberikan dukungan, pendapat kepada presiden sebisa mungkin, tugas itu sebetulnya adalah mengumpulkan dukungan dan pendapat dari kementerian-kementerian, lalu kami rangkum sedemikian rupa untuk menjadikan satu pendapat yang padat, ringkas, sehingga mudah untuk dicerna baik oleh presiden dan wakil presiden.

hwa di dalam melaksanakan tugas sebagai seskab saya tidak menterian-kementerian di bawahnya. Saya seperti mengatur lalu-lalu lintas, membutuhkan itu berjalan, dan apa saja yang diarahkan presiden ke menteri di kabinet kerja itu berlangsung dengan baik. Saya sebagai Seskab sekali lagi tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan, tidak juga punya kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan.

Anggaran-anggaran yang tadi dimunculkan untuk melakukan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet itu pada dasarnya adalah roda perputaran, atau alur bisnis, alur kerja, bisnis proses yang harus kami lakukan setiap bulan dan setiap bulannya. Jadi misalnya kalau mau ada rapat kabinet kaya hari ini, sidang kabinet Paripurna hari ini. Topiknya ada 2, maka seminggu sebelumnya, saya sudah harus bertanya ke menteri-menteri apa yang akan mereka masukan kepada presiden, 2 Minggu sebelumnya saya harus meminta kepada menteri-menteri usulan topik sidang. 3 Minggu sebelumnya saya sudah harus melakukan identifikasi masalah-masalah yang harus dibawa ke presiden yang bisa di matangkan, untuk dibicarakan di sidang Paripurna atau rapat terbatas di tingkat Menko-menko, itu alur kerja kami. Nah alur kerja itu yang kemudian didukung oleh kegiatan-kegiatan tersebut.

Ada alur kerja lain yang tidak berkaitan dengan sidang kabinet itu adalah perumusan 3 aturan yaitu: Perpres, Kepres dan Inpres. Nah sekali lagi substansi Perpres, Keppres, dan Inpres bukan di kami, bukan di Seskab, substansinya selalu berasal dari Kementerian terkait.

Jadi misalnya sekalipun presiden mengatakan tolong siapkan Perpres tentang A, tugas dari Seskab adalah mengidentifikasi A ini tugas Kementerian apa? lalu kemudian mengatakan ke menteri, presiden meminta R Perpres tentang A, izin Prakarsa nya turun, tolong substansinya dimasukkan kami alirkan lagi ke atas. Dan proses itu sudah kami buat SOP sedemikian rupa, sehingga misalnya untuk Perpres, dan Kepres dan Inpres paling lama itu harus diselesaikan dalam waktu 11 hari. Dalam 3 bulan kami bekerja sudah di evaluasi berapa lama kami rata-rata mengerjakan satu Perpres dari 11 hari SOP itu rata-rata kami melakukan satu perpres dalam 3 bulan ini adalah 4,7 hari. Jadi lebih kurang dari setengah dari SOP yang diterapkan. Nah sekali lagi kami bukan pengambil keputusan tadi banyak pertanyaan yang berkaitan tentang misalnya kegaduhan pertama istilahnya tentang hal nomenklatur, nomenklatur Kementerian itu adalah Perpres 165, mungkin bapak dan ibu bisa mengngat bahwa saya sebagai Seskab tidak dilantik tanggal 27 Oktober seperti Menteri-menteri lainnya, saya dilantik tanggal 3 November, satu Minggu setelah menteri-menteri itu dilantik.

Pada saat itu presiden sudah menetapkan 34 Kementerian, Perpresnya muncul tanggal 27 Oktober, Perpres itu Perpres 165 tahun 2014, Perpresnya memang dimaksudkan sebagai transisi kelembagaan Kementerian yang memberikan waktu bagi setiap Kementerian untuk melakukan konsolidasi kelembagaan terutama Kementerian-Kementerian dengan nomenklatur baru, seperti misalnya Kementerian Ristek dan Dikti, atau Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi 4 bulan sejak perpres itu diberlakukan. *Deadline*-nya sebetulnya adalah tanggal 27 Februari *deadline* bagi masing-masing Kementerian untuk menata kementeriannya sesuai dengan nomenklatur yang baru, tapi *deadline* itu dipercepat ke akhir Desember untuk membantu kementerian dan juga bapak ibu di DPR, juga untuk memproses APBNP 2015, sehingga relatif Perpres itu sudah muncul dan sudah bisa digunakan oleh kementerian-kementerian terutama dengan nomenklatur baru, untuk menyusun kelembagaannya, untuk menyusun programnya, dan memasukan anggarannya, dalam APBNP 2015, itu yang tadi disebut sebagai nomenklatur.

Memang ada kesadaran bahwa ini akan ada transisis kelembagaan dan oleh Presiden diberikan waktu 4 bulan.

Untuk Bapak Ibu ketahui hal yang sama juga dapat pengarahan dari presiden untuk unit kerja kepresidenan di bawah kepala staf. Presiden menetapkan dalam Perpres pembentukan unit kerja kepresidenan itu, bahwa unit itu akan dipegang kepala staf, akan dipimpin oleh kepala staf langsung di bawah presiden dibantu oleh 3 asisten kepala staf, 3 asisten itu tidak ada nomenklatur khususnya. Jadi harus didiskusikan antara presiden dan kepala staf bagaimana nanti memberikan penugasan kepada 3 asisten tersebut. Presiden memberikan waktu bagi kepala staf dibantu nanti oleh mensesneg dan

staf untuk melakukan konsolidasi kelembagaannya, Kepala Staf
ber, jadi kira-kira di akhir Maret konsolidasi kelembagaan ini
bisa kami laporkan ke Ibu Bapak di DPR.

Dengan penataan kelembagaan itu yang dimaksudkan oleh Presiden lagi-lagi adalah Sekneg
bertugas mengawal Presiden sebagai Kepala Negara, Seskab bertugas mengawal Presiden sebagai
kepala Pemerintahan dengan hubungan kerjanya dengan menteri-menteri, sementara Kepala Staf
Kepresidenan itu semacam modifikasi, transformasi dari UKP4 nya Pak SBY. Ini memberikan
pertimbangan-pertimbangan strategis, mencari sumbatan-sumbatan yang harus diselesaikan terutama
untuk program-program prioritas Presiden, dan membantu Presiden dalam komunikasi-komunikasi
politik untuk memastikan program-program prioritas Presiden itu bisa berlangsung dengan baik.

Presiden dalam bahasa yang sederhana itu punya rumus begini untuk program-programnya,
ada 3 program wajib pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan ini 3 program wajib. Ada 5
program yang menjadi program prioritas Presiden, infrastruktur, maritim, energi, pangan dan
pariwisata, ini 5 prioritasnya presiden, dan ada satu program dukungan duta perhubungan itu adalah
reformasi birokrasi, program yang harus dilaksanakan untuk memastikan terutama 5 program prioritas
presiden itu berjalan dengan baik.

Kira-kira kepala staf kepresidenan itu memastikan program-program ini tidak mengalami titik
sumbat ketika dijalankan oleh pemerintahan 2014-2019 dan juga memastikan program-program ini
akan mendapatkan dukungan politik, dukungan anggaran yang memadai, dari DPR.

Ijinkan saya masuk pada kegaduhan kedua,

KETUA RAPAT:

Ada interupsi bahwa waktu tadi sampai jam 16.00, kita sepakati kita perpanjang sampai jam 6
atau jam setengah lima, 16.30, Oke sepakat.

(RAPAT : SETUJU)

SEKRETARIS KABINET:

Baik tentang masalah yang sekarang menjadi perhatian luas dari masyarakat, masalah tentang
Pak budi Gunawan dan tentang KPK, sekali lagi pada awalnya pengangkatan dan pemberhentian
kapolri adalah fungsi dari Kementerian Sekretaris Negara, karena disana ada Setmil yang bertanggung
jawab mengatur secara formal proses pengangkatan, pemberhentian baik Panglima TNI, Kepala Staf
angkatan, maupun Kapolri.

Ketika saya ingat hari Jumat proses ini dilakukan segala sesuatu berjalan normal-normal saja,
baik-baik saja, saat itu lalu Pak Mensesneg yang berkenan memberi tahu saya bahwa presiden akan
melakukan pencalonan Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kami kemudian diminta membuat
pertimbangan dan pertimbangan yang kami buat saat itu adalah pertimbangan hukumnya, bahwa
berdasarkan Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, dalam pengangkatan, pemberhentian,
Kapolri, Presiden harus mendapatkan pertimbangan dari Kopolnas dan itu yang kemudian dicek,
yang kemudian suratnya diberikan secara tertulis oleh Pak Tejo Edi sebagai Ketua Kopolnas, selesai
pertimbangan hukumnya. Lalu proses politik berjalan di DPR, dalam proses politik itu muncul masalah
hukum ketika ada penetapan status tersangka dari KPK terhadap Pak Budi Gunawan, pertimbangan
yang kami lakukan saat itu pada dasarnya ada 3 pertimbangan besar, mohon maaf lalu rinciannya tidak
bisa saya berikan karena ini malah dilakukan dalam pertemuan-pertemuan tertutup dengan Presiden,
jadi saya harus meminta ijin presiden dulu kalau pertimbangan-pertimbangan ini bisa kami sampaikan
ke Bapak Ibu anggota DPR.

Pertimbangan yang kami lakukan pada dasarnya 3 pertimbangan bahwa Presiden harus
memperhatikan proses politik yang ada di DPR, Presiden juga harus memperhatikan proses hukum

an harus juga melihat pertimbangan-pertimbangan etika sosial yang itu yang kami bakukan dan kami berikan ke Presiden. Media, sebagai staf Presiden kami kemudian berkewajiban menyiapkan seluruh kerangka legal formal yang dibutuhkan oleh presiden apa pun keputusan presiden, tentang masalah ini. Presiden ingin memutuskan A kerangka legal formalnya kami siapkan. Presiden ingin memutuskan B, kerangka legal formalnya juga kami siapkan, apa pun keputusan presiden tentang hal ini, kerangka legal formalnya sudah siap, kami tinggal presiden mengambil keputusannya, tapi yang kami pahami adalah presiden memang harus melakukan kalkulasi secara cermat sehingga ketiga proses tadi, proses politik, proses hukum dan proses etika sosial yang ada di masyarakat, itu bisa bertemu dengan baik dan itu yang saya pikir sedang di kalkulasi secara cermat oleh presiden, kami sebagai staf tidak punya kewenangan apapun tentunya untuk memberikan desakan misalnya kerangka waktu kepada presiden, itu sepenuhnya adalah kewenangan presiden.

Kapan saja presiden membutuhkan kami untuk memperkuat data-data, pertimbangan-pertimbangan, kami siap memberikan dalam proses itu presiden memerintahkan kami untuk melakukan tadi yang disebut adalah tata pemerintahan yang baik, tata pemerintahan yang baik antara lain kami lakukan sesuai dengan arahan Presiden melibatkan *stakeholders-stakeholders* yang relevan, pemangku-pemangku kepentingan yang relevan, karena itu ketika Presiden misalnya meminta supaya dari kepolisian dimanggil untuk berbicara langsung dengan Presiden itu dilakukan, dari KPK dipanggil bicara langsung dengan Presiden dilakukan. Dari unsur masyarakat dipanggil untuk berbicara memberikan pertimbangan ke Presiden itu juga dilakukan sebagai wujud dari upaya kami dalam masalah yang sensitif ini, tata pemerintahan tetap terjaga, tata pemerintahan yang baik tetap terjaga, antara lain dengan metode partisipatorik. Dimana *stakeholders-stakeholders* yang berkepentingan itu betul-betul bisa mendapatkan saluran untuk menyuarakan pertimbangan-pertimbangannya ke Presiden, tapi dari apa yang kami amati dengan masukan-masukan yang ada akhirnya presidenlah yang akan memutuskan, bukan siapa-siapa lagi tapi Presiden yang akan memutuskan, bagaimana baiknya tentang Kapolri ini.

Jika memang terjadi hal-hal yang bergesekan seperti yang tadi oleh Pak Budiman Sujatmiko sampaikan di Media dan Menteri-Menteri memang tugas kami melaporkannya ke Presiden, bahwa terjadi dampaknya belum ada kesatuan pandang antara Menteri A dengan Menteri B tentang isu ini, maka Presidenlah yang kemudian akan memberikan arahan-arahan tertentu kepada Menteri-menteri terkait supaya tidak terulang lagi, supaya kedepannya dalam menyikapi isu-isu terutama yang sensitif di masyarakat ada kesatuan pandang.

Tapi sekali lagi terima kasih atas masukan-masukan tentang bagaimana kabinet kerja ini bisa bekerja lebih baik lagi ke depan. Berkaitan dengan itu juga ditanyakan tentang juru bicara Presiden, jurubicara kepresidenan, saya akan menyampaikan saran dari Bapak Ibu dari komisi II ini presiden, presiden memang pada dasarnya menginginkan menteri-menteri teknis itu yang menjadi juru bicara di isu-isu teknis tersebut. Jadi Menteri Perhubungan yang tadi berbicara misalnya bicara tentang musibah Air Asia, dan Menteri Dalam Negeri berbicara tentang perbatasan dan seterusnya. Itu yang diinginkan oleh presiden yang saya pahami sehingga sampai hari ini Presiden belum menunjuk juru bicara tertentu secara spesifik seperti Presiden-presiden sebelumnya tapi saya akan menyampaikan saran masukan dari Bapak Ibu di Komisi II tentang kemungkinan dibutuhkannya juru bicara Kepresidenan.

Untuk isu-isu lain misalnya tadi ada isu kecil tentang twitter dan facebook, yang perlu saya jelaskan adalah saya harus menjelaskan ke publik bahwa presiden Joko Widodo tidak memiliki akun facebook dan twitter resmi sebagai presiden. Akun twitter dan facebook itu dibuat oleh presiden Joko Widodo sebelum beliau menjadi presiden dan saat itu dibuat ada kaitannya dengan kampanye pilpres yang dilakukan. Jadi saya menjelaskannya sebagai Setkab ketika ditanya oleh pers apakah ada twitter dan facebook, akun media sosial dari Presiden RI yang dikelola oleh Setneg atau Seskab, saya menjawabnya tidak ada akun yang dikelola oleh Setneg dan Seskab, akun itu adalah akun pribadi, bukan aku Bapak Joko Widodo sebagai akar Presiden Republik dari Indonesia.

mbicaraan tentang desa misalnya yang ditanyakan juga an ini, mestinya sudah bisa diakses baik di Kumham maupun n bagian tugasnya menjadi jelas, bahwa Kementerian Dalam Negeri itu bertanggung jawab untuk mengurus pemerintahan desa, sementara pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan desa itu ada di Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, nah perlu saya jelaskan bahwa dana desa yang ditargetkan nantinya Rp 1-1,4 miliar per desa, itu akan disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke desa melalui kepala daerah di tingkat kabupaten, jadi tidak lewat Kementerian Dalam Negeri, tidak lewat Kementrian Desa, tapi langsung disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke desa melalui Bupati. Tentunya kami mengharapkan ada sinergi terutama dari bapak ibu di DPR bagaimana agar 3 fungsi yang adasekarang tentang Desa, satu di Kementerian Dalam Negeri, dua di Kementerian Desa, itu bisa terintegrasi dengan baik, sehingga terutama penggunaan dana desa itu betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat desa dan memajukan pembangunan Desa kita ke depan. Dan ada nanti program-program khusus untuk desa-desa di perbatasan, desa-desa tertinggal dan seterusnya.

Hal lain tentang tata ruang perbatasan, ini instruksi presiden, arahan presiden dalam sidang-sidang kabinet sebetulnya mirip-mirip dengan misalnya untuk masalah narkoba yang tadi sudah disampaikan oleh anggota DPR yang terhormat, pada dasarnya presiden memang tidak menginginkan untuk satu program yang sama, dananya terbagi dalam sekian belas kementerian atau lembaga, berusaha dikonsolidasikan hanya kalau bisa 2 atau 3 lembaga saja. Hal yang sama misalnya tentang narkoba, yang presiden pagi ini ke BNN itu arahan presiden dana misalnya untuk rehabilitasi pengguna narkoba tidak itu lagi tersebar ke sekian belas kementerian atau lembaga, tapi fokuskan saja supaya itu bisa disinergikan antara BNN, Kepolisian dan Kementerian Sosial misalnya.

Hal yang sama dengan perbatasan, Presiden dan sudah beberapa kali mengunjungi perbatasan baik di Kalimantan dan di Papua dan memahami bahwa ke salah satu masalah terbesar dalam perbatasan itu pembangunan perbatasan dananya tersebar ke banyak kementerian dan lembaga, karena itu sudah ada arahan presiden supaya dananya fokus ke 2 kementerian antara lain Kementerian Dalam Negeri dimana Mendagri sebagai kepala BNPB dan juga Kementerian Desa terutama untuk membangun wilayah-wilayah perbatasan, reorientasi, realokasi anggaran ini sudah dilakukan supaya tadi penyerapan anggarannya lebih terfokus nanti kendali dan penggunaan anggaran itu jika juga bisa berjalan dengan baik,.

Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan jika ada yang belum sempat saya sampaikan, perlu saya tambah silakan.

KETUA RAPAT:

Ada yang mau menanggapi?

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si):

Pimpinan, yang pendapatan sewa Rp. 2 juta itu

KETUA RAPAT:

Oh ya, itu menjadi penting Pak Agung ya?

SEKRETARIS KABINET:

Baik bapak, itu adalah pendapatan dari sewa rumah dinas, ada pegawai staf Setkab yang menyewa rumah dinas di kompleks Setneg yang sewanya harga sewanya bukan kami yang menetapkan, ada Cipta Karya yang menetapkan, dan harga sewanya murah sekali memang, kalau

lan sehingga pendapatannya ya cuma 2,4 juta satu tahun itu, mi untuk mensejahterakan pegawai-pegawai di lingkungan

KETUA RAPAT:

Jadi bukan gedung bertingkat Pak Agung, Pak Budiman silakan.

F-PDI-P (BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil):

Sedikit mau memberikan masukan saja untuk Pak Seskab untuk pembagian kerja diantara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri disebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri mengurus pemerintahan, Kementerian Desa mengurus pembangunan dan pemberdayaan, meskipun kalau menurut aturan Undang-Undang soal pemberdayaan itu berjenjang ya, dia bukan cuma tanggung jawab Pemerintah pusat, tapi juga propinsi dan Kabupaten.

Nah kabupaten tugas *conccurent* kabupaten itu kan juga berkaitan dengan dengan Kementerian Dalam Negeri, nah ini agak *overlapping* karena pemberdayaan disebutkan bagian dari Kementerian Desa, tapi pemberdayaan itu tersendiri dalam bentuk pendampingan itu tanggung jawab pemerintah pusat, propinsi dan Kabupaten, yang kebetulan ini juga urusannya Kementerian Dalam Negeri, jadi memang ini sebenarnya belum menjawab sepenuhnya benang kusut beberapa fungsi ini, jadi saya kira saya hanya memberi masukan saja, menyampaikan kira kira apa kira-kira yang nanti akan menjadi persoalan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Masih ada lagi sedikit lagi.

WAKIL KETUA (MUSTAFA KAMAL, S.S/F-PKS):

Ini nyambung dengan beliau kalau Menko yang ada itu mengkoordinasi 2 kementerian ini atau terpisah pak ya? Cluster yang terpisah atau mereka tergabung.

SEKRETARIS KABINET:

Kementerian Dalam Negeri dibawah Menkopolkam, sementara Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dibawah Menko PMK, hanya untuk berusaha mengorganisasi kan ini rapat terbatasnya memang di sengaja bahwa rapat terbatas Menkopolkam itu berbarengan waktunya dengan rapat terbatas Menko PMK. Jadi Menkopolkam dengan Menko PMK, Menko perekonomian dengan Menko Maritim, itu upaya yang dilakukan supaya kordinasinya berjalan lebih optimal.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira cukup dan sesuai dengan, berapa menit ini? ini sudah masuki setengah 5.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, SH., MH):

Pak Ketua, biar saya to the point, tidak punya kemampuan untuk bicara yang panjang.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, SH., MH):

Pimpinan sidang dan tadi bukan menteri ya, Seskab, Pak Seskab yang saya hormati.

Saya ada usul-usul perbatasan saya tahu Pak Jokowi sangat konsern soal perbatasan, tapi kemarin saya lihat usulan Menteri Dalam Negeri soal kegiatan di perbatasan itu bikin tugu ada speed boat itu saya fikir tidak menyelesaikan soal, saya ada usul konkrit kalau bisa di daerah perbatasan status kota Kabupaten maupun kota di daerah-daerah perbatasan itu diangkat status dibawah pengawasan langsung Menteri Dalam Negeri tidak lewat Gubernur, jadi ada penanganan yang fokus terhadap kota-kota di perbatasan itu, supaya satu saat daerah-daerah itu ada harapan kalau tidak, saya pikir ini hanya lebih ke soal ada perhatian apa prihatin tapi tinggal implementasinya saya ragu untuk diselesaikan. Jadi status kota-kota perbatasan mungkin sekarang tidak semua tapi paling tidak di Sabang, Merauke ada titik mulai dikasih baik statusnya, kemudian tingkatkan aktivitas ekonomi di sana, kalau hanya sekedar untuk bikin tugu, bantuan speedboat, itu dari waktu ke waktu sama saja, karena pengawasan pemerintah pusat kesana lemah sekali.

Terima kasih

WAKIL KETUA (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si/F-PKB):

Sedikit Ketua, soal perbatasan ini juga nyambung Pak Komaruddin ini, apresiasi kita terhadap keseriusan presiden untuk daerah perbatasan, cuma ini kita sampaikan kemarin ke hadapan Menteri Dalam Negeri juga tolong sampaikan kepada presiden ini anggarannya tidak berubah signifikan Pak, ya antara presiden sebelumnya kabinet yang lalu, dengan yang sekarang dan dulu 8,7 trilyun sekarang cuma Rp 9 sekian trilyun, jadi kita masih belum melihat akan ada perubahan satu tahun ini ke depan berkenaan dengan pembangunan perbatasan dari sisi anggaran Pak ya.

SEKRETARIS KABINET:

Ya untuk itu mungkin kalau seandainya anggaran perbatasan di Kementerian Dalam Negeri perubahan tidak terlalu signifikan, tapi yang betul-betul akan terlihat kalau ini dijalankan dengan baik adalah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur perbatasan, jadi misalnya jalan perbatasan laut, atau fasilitas komunikasi di perbatasan, atau misalnya dari arahan presiden untuk memastikan RRI dan TVRI itu betul-betul masuk di terima di seluruh desa-desa perbatasan, nah hal-hal seperti itu akan tampak dari Kementerian PU, akan tampak dari anggaran Kominfo, sesuai fungsi teknis masing-masing, tapi memang ada gempuran besar untuk membangun perbatasan selama 2015-2019.

WAKIL KETUA (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si/F-PKB):

Begini Pak Menteri eh Pak Seskab yang saya sebutkan tadi Rp 8,7 triliun dan Rp 9 triliun itu justru di sektoral itu Pak, bukan di Mendagri, di sektoral jadi kita melihat sedikit sekali naiknya, pada visi presiden kan luar biasa untuk perubahan di perbatasan tolong ini di sampaikan juga mungkin Pak Presidennya belum mendapatkan laporan soal ini.

mpaikan ke presiden.

KETUA RAPAT:

Baik saya kira cukup dan sebagaimana kita sepakati tadi tadi rapat ini harus dengan kesimpulan dan saya bacakan kesimpulan untuk mendapatkan harapan dari anggota:

- 1) Komisi 2 DPR RI menerima dan memahami pemaparan sekretariat kabinet terkait dengan rencana strategis Sekretariat Kabinet tahun 2015 sampai dengan 2019 dan meminta Sekretariat Kabinet untuk dapat melaksanakannya secara konsisten, dengan memperhatikan catatan-catatan yang disampaikan oleh komisi II DPR RI, ada komentar, bisa disetujui ?

(RAPAT : SETUJU)

- 2) Komisi II DPR RI dapat laporan realisasi pelaksanaan APBN tahun 2014 Sekretariat Kabinet dengan tingkat penyerapan sebesar 149 milyar lebih, dari alokasi anggaran sebesar 170 Miliar lebih, atau 87,23% dan meminta kepada Sekretariat Kabinet agar penyerapan anggaran tahun 2015 dapat lebih dioptimalkan, *gimana?*

(RAPAT : SETUJU)

Terhadap anggaran sekretariat kabinet perubahan RAPBN Perubahan 2015 sebesar Rp 178 miliar lebih, komisi II DPR RI dapat memahaminya dan akan membahasnya secara lebih mendalam pada Rapat Dengar Pendapat yang akan datang. Sudah dipastikan waktunya Seskab tanggal 9 eh tanggal 7 hari Sabtu jam 09.00, itu sudah saya kira agenda itu.

Saya kira demikian Rapat Kerja telah selesai dengan mengucapkan *alhamdulillahirrabbi lalamin* saya nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.50 WIB)

Semoga Allah SWT meridhoi kerja kita sekalian, amin.

***Wabillahitaufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**Jakarta, 2 Februari 2015
Ketua Rapat**

ttd

**Rambe Kamarul Zaman
A-236**